

**B U M N**

# POLITICAL COST DAN BUMN

- BUMN sebagai Badan Usaha Milik Negara sering ditafsirkan bahwa negara berkuasa penuh terhadap kinerja BUMN. Sehingga BUMN menjadi tergantung kepada siapa yang memerintah dan yang menjalankannya.
- BUMN menjadi fokus perhatian masyarakat, karena adanya gap antara fasilitas yang dimiliki BUMN dengan harapan masyarakat.
- BUMN beroperasi dengan dukungan fasilitas penuh (modal, perlakuan, sektoral). Sedangkan masyarakat sangat berharap mendapatkan manfaat dari keberadaan BUMN yang belum bisa terpenuhi secara optimal.
- **BUMN dan Birokrasi :**  
Dominannya peran negara menjadikan BUMN sebagai kepanjangan tangan penguasa yang sarat kepentingan politik merupakan salah satu sebab BUMN tidak bisa berkembang sebagaimana layaknya badan usaha.

# POLITICAL COST DAN BUMN

- Struktur Organisasi BUMN :
  - ❑ **Pemilik** : Pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan dan Menteri Negara Investasi dan BUMN
  - ❑ **Komisaris** : Para pejabat Departemen Keuangan, Kementerian Negara Investasi dan BUMN dan departemen lainnya
  - ❑ **Direktur** : Diisi orang-orang yang memiliki latar belakang beragam
  - ❑ **Hukum** : Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT)
  
- **Kekuatan BUMN** :
  - a. Jumlah Dan nilai aset yang besar
  - b. Posisi Dan bidang usaha yang strategis
  - c. Akses ke kekuasaan lebih besar
  - d. Akses ke sumber pendanaan, khususnya Bank pemerintah lebih besar
  - e. Perlakuan birokrasi berbeda dengan swasta
  - f. Definisi negara sebagai pemilik dan pemerintah sebagai regulator sulit untuk dipisahkan dan melekat pada BUMN itu sendiri.

# POLITICAL COST DAN BUMN

## ■ Kelemahan BUMN :

- a. Keterlibatan birokrasi dengan kepentingannya menimbulkan penyimpangan policy direction yang merugikan BUMN sendiri
- b. Policy direction yang merugikan timbul karena adanya kepentingan elite BUMN yang ditampilkan melalui formal policy
- c. Birokrat di BUMN sulit membedakan dirinya sebagai birokrat atau profesional perusahaan, sehingga menimbulkan political cost yang sulit diukur
- d. Aset yang besar dan tidak disertai utilitas optimal berakibat over-investment dan pemborosan yang membebani BUMN itu sendiri
- e. Kemudahan dari negara adalah bentuk subsidi yang setara dengan cost bagi rakyat banyak

# POLITICAL COST DAN BUMN

- f. Perlakuan istimewa negara kepada BUMN menjadikannya tidak peka terhadap lingkungan usahanya, lemah dalam persaingan, tidak lincah dalam bertindak, lamban mengambil keputusan, sehingga hilangnya momentum yang berakhir pada kerugian
- g. Privileges yang diberikan birokrasi harus dikompensasi dengan memberikan kemudahan kepada pihak lain melalui policy direction yang menjadi political cost bagi BUMN.
- h. Keterlibatan birokrasi dalam BUMN yang berlangsung lama sering menyulitkan direksi untuk bertindak objektif.

# STRUKTUR REVENUE DAN EXPENSE BUMN

- BUMN sebagai development agent boleh boros atas nama pembangunan, sehingga manajemen memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi.
- BUMN memiliki strategic position atau natural monopoli, sehingga revenue bersumber dari captive market yang jarang dimiliki oleh swasta.
- Kebocoran dan penyimpangan yang muncul di BUMN :
  1. Munculnya pos pengeluaran fiktif untuk menampung political cost
  2. Lahirnya biaya yang tidak relevan dengan core business BUMN
  3. Biaya-biaya yang dikeluarkan tidak mengandung kewajaran dari aspek bisnis normal yang berakibat BUMN terjebak bisnis berbiaya tinggi.
  4. Over investment yang terus menerus menimbulkan cost yang terus menerus ditanggung selama hidup BUMN.

# ASSESSMENT TERHADAP PUBLIC ACCOUNTABILITY

## ▪ **Rekonstruksi BUMN :**

1. berbagai bentuk, praktik dan pola-pola yang menimbulkan political cost harus dihilangkan atau diminimumkan
2. Political will dari pemerintah untuk mengatasi sungguh-sungguh dan terencana
3. Pemerintah harus menetapkan pola rekrutmen yang baku karena hingga saat ini belum ada pola rekrutmen yang jelas

## ▪ **Pembenahan BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa :**

1. Meminimalkan keterlibatan birokrasi di BUMN
2. Redefinisi BUMN menjadi Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) sehingga pertanggungjawaban pengelola BUMN kepada rakyat.
3. Budaya mundur bagi direksi-komisaris BUMN harus mulai ditanamkan sehingga ada kejelasan hubungan antara performance dan punishment.
4. Pengelola yang berprestasi dipertahankan dan dipromosikan sedangkan yang bermasalah diberhentikan berdasarkan kriteria yang objektif

# ASSESSMENT TERHADAP PUBLIC ACCOUNTABILITY

4. Melakukan review terhadap keberadaan BUMN melalui :
  - a. BUMN yang bergerak dalam bidang usaha yang telah dilaksanakan masyarakat atau swasta tidak perlu lagi ada BUMN. BUMN yang ada diprivatisasi 100%
  - b. Prioritas utama adalah bank-bank BUMN dan perusahaan sekuritas diswastakan 100% karena menjadi beban negara
  - c. BUMN yang memiliki posisi strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak dan bidang usahanya tidak dilaksanakan swasta, perlu dipertahankan.
  
5. Hilangkan political cost dengan public accountability dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Keterlibatan pemerintah melalui :
  - a. Pola rekrutmen yang objektif dan terukur
  - b. Perencanaan anggaran, misi dan visi perusahaan
  - c. Evaluasi kerja BUMN melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS)

# PRIVATISASI BUMN

- **Tujuan dari privatisasi BUMN antara lain :**
  - ❑ Memberikan kesempatan kepada BUMN untuk melakukan direct placement dan go public
  - ❑ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMN dalam rangka menghadapi persaingan di pasar global dan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan serta dalam pemilikan saham BUMN.
  
- **Pasar Modal dan Democratization of Capital**
  - ❑ Pasar modal bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam rangka pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional.
  - ❑ Pasar modal berfungsi menghimpun dana yang dapat digunakan untuk sumber pembiayaan bagi dunia usaha.
  - ❑ Keberadaan pasar modal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan berskala besar, menengah maupun kecil baik swasta maupun BUMN.

# PRIVATISASI BUMN

- ❑ Pasar modal juga sebagai wahana penyebarluasan pemilikan saham (democratization of capital)
- ❑ Pasar modal juga memberikan manfaat dalam peningkatan efisiensi perusahaan
- **Peran BUMN dalam Pasar Modal**
  - ❑ Tahun 1977, BUMN dipercaya untuk membantu pengembangan pasar modal , yaitu melalui PT Danareksa.
  - ❑ Partisipasi BUMN diharapkan lebih ditingkatkan lagi dengan aktivitas BUMN sebagai emiten. Partisipasi emiten di pasar modal akan meningkat Dan terus meningkat sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka privatisasi BUMN.
  - ❑ Sejalan dengan kebijakan privatisasi, khususnya melalui pasar modal peranan yang lebih besar bagi BUMN sebagai emiten dalam pengembangan pasar modal di masa datang, merupakan suatu kenyataan yang tidak sulit dicapai.

# PRIVATISASI BUMN

- ❑ BUMN sebagai badan usaha mempunyai peranan yang sangat besar dalam menciptakan likuiditas pasar mengingat pada umumnya BUMN memiliki asset yang besar.
- ❑ BUMN dapat pula mempengaruhi perkembangan pasar modal karena faktor daya tarik BUMN bagi masyarakat.
- ❑ Dengan masuknya BUMN ke pasar modal diharapkan akan berdampak positif terhadap pengembangan pasar modal di Indonesia
- ❑ Semakin banyak BUMN yang Go Public, diharapkan akan menciptakan iklim yang semakin baik bagi pengembangan pasar modal yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.

# PRIVATISASI BUMN

## ▪ Hambatan Privatisasi :

- ❑ Menyangkut kultur dalam BUMN itu sendiri. Hampir di semua lini dan level dalam BUMN, mulai dari tingkat menteri hingga jajaran direksi berperilaku sebagai pemegang saham di samping fungsi-fungsi lain yang dimiliki pemerintah sebagai regulator
  - ❑ BUMN terlalu banyak menggunakan tenaga konsultan yang tidak jelas peranan dan fungsinya.
- 
- Privatisasi memang tidak selalu go public (initial public offering – IPO) melalui pasar modal. Privatisasi juga bisa dilakukan secara langsung (private placement) dengan mengundang investor strategis (strategic partners)
  - Di Indonesia program privatisasi dilakukan dalam wacana reformasi, demokrasi dan penegakan hukum (law enforcement). Dari sisi ini pelaksanaan privatisasi juga harus dipertanggung jawabkan kepada public

# MASALAH POKOK BUMN

- Kekayaan negara bisa diklasifikasikan menjadi 4 kategori :
  1. Kekayaan yang diperoleh melalui APBN
  2. Yang dipisahkan Dan masuk dalam BUMN
  3. Yang dikelola BPPN akibat krisis moneter
  4. Anugrah Yang Maha Esa diwariskan oleh nenek moyang
  
- Masalah pokok yang terkait dengan kekayaan negara adalah : pencatatan dan pengadministrasian, utilitas dan aspek pengelolaannya dan akuntabilitas para pengelola kekayaan negara

# ADMINISTRASI KEKAYAAN NEGARA

- **Kenyataan di lapangan masih sering menunjukkan :**
  - a. Akurasi pencatatan dan administrasi kekayaan negara yang berasal dari APBN masih diragukan mengingat banyaknya kasus-kasus yg menyelimuti keberadaan kekayaan negara
  - b. Nilai kekayaan negara di BUMN masih siur
  - c. Nilai kekayaan yang dikelola BPPN juga penuh dengan kontroversi yang sampai dengan saat ini membingungkan masyarakat
- Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak Cuma mencatat aset-aset milik negara, tapi juga mencatat hutang negara secara akurat dan tepat waktu.
- Kemajuan teknologi mengharuskan setiap negara untuk menerapkan *Fund Accounting* yang baik

# AKUNTABILITAS KEKAYAAN NEGARA

- Akuntabilitas kekayaan negara sangat terkait dengan sistem dan budaya politik yang dianut, landasan hukum, SAP, profesionalitas dan integritas dari para penyelenggara negara
- Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban politik dan hukum penyelenggara negara terhadap kewenangan dan mandat yang diberikan rakyat. Lemahnya SAP, lemahnya landasan hukum serta rendahnya integritas pengelola kekayaan negara akan menjadikan kekayaan negara bukan sebagai sumber daya yg optimal melainkan sebagai pemborosan.

# Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat

- Reformasi di bidang pengelolaan kekayaan negara melalui penyusunan SAP yang sehat akan memberikan manfaat :
  - a. Memungkinkan pengelolaan kekayaan negara yang transparan, akurat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
  - b. Mencegah dan meminimumkan kebocoran
  - c. Mempermudah ditemukannya adanya penyimpangan dan dapat dipakai untuk pengukuran efisiensi
  - d. Membantu apabila pemerintah ingin memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari masyarakat melalui obligasi
  - e. Membantu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat
  - f. Memberi contoh kepada masyarakat atau swasta tentang *good public government* dan tidak hanya menuntut *good corporate government* dari mereka